

LPPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KAB.PESISIR SELATAN
2019

Form 3 :1

Lampiran III.1
TATARAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Dinas Lingkungan Hidup

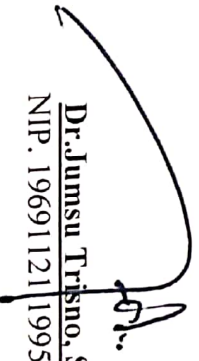
	ASPEK	FOKUS	No	IKK	RUMUS /PERHITUNGAN	JENIS DATA (TAHUN 2018)	CAPAIAN KINERJA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH SERTA, SERTA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Hubungan Antar Daerah	13	Kerja sama dengan daerah lain atau pihak lain	Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun 2019	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak o MOU yang terdiri dari :	o MOU	
13	TEROBOSAN/INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penghargaan	42	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Jumlah Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2017	Penghargaan yang diterima, yang terdiri dari : 1. Piala Adipura Tahun 2018 2. Sertifikat dan Plakat Program Kampung Iklim (Proiklim) Kategori Utama Tingkat Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Kampung Alai Limau gadang Lumbo Kec. IV Jurai . 3. Sertifikat Program	13 Penghargaan	

FORMAT III.3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

NO.	URUSAN		IKK	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA**)
(1)	(2)	(3)	(4)				
3	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten	30% IKA + 30% IKU + 40% IKT	25,179+23,4+29,6	78,179	Dinas Lingkungan Hidup
		91	Ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyampaikan laporan terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten _____ x 100 % Usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten	(16) x100% (57)	28 %	Dinas Lingkungan Hidup

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Dr. Jumsu Triyono, Sp.M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Yaitu:

1. 4 (Empat) Pabrik
2. 19 (Sembilan Belas) Puskesmas
3. 4 (Empat) Rumah Sakit
4. 6 (Enam) Kebun
5. 4 (Empat) Stone Cruiser
6. 4(Empat) Galian C
7. 4(Empat Hotel
8. 8 (Delapan)SPBU
9. 4 (Empat) PLTM

Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyampaikan laporan terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Yaitu

1. 4 (Empat) Pabrik
2. 4 (Empat) Rumah Sakit
3. 6 (Enam) Kebun
4. 2 (Dua) PLTM

Painan, Januari 2020

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Dr. Jumsu Trisno, Sp.M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten

$$\text{Rumus} = 30\% \text{ IKA} + 30\% \text{ IKU} + 40\% \text{ IKT} = 25,179 + 23,4 + 29,6 = 78,179$$

$$\text{Indeks Kualitas Air} = 83,93$$

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 78$$

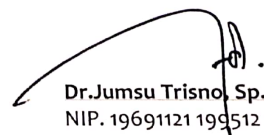
$$\text{Indeks Kualitas Tutupan lahan} = 74$$

$$\text{IKA} = 30\% \times 83,93 = 25,179$$

$$\text{IKU} = 30\% \times 78 = 23,4$$

$$\text{IKT} = 40\% \times 74 = 29,6$$

Painan, Januari 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Dr. Jumsu Trisno, Sp.M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

KABUPATEN PESIR SELATAN
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1. LINGKUNGAN HIDUP

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	RUNJUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA
						URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LH
		Program Nasional 1 (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH	1	Jumlah Program Nasional dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan PERANGKAT DAERAH, sebanyak 4 program 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan 4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	100 %
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PENYERENTAHAN	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 24 yang terdiri dari: 1. SOP tentang Sosialisasi Adiwiyata (Sekolah Berwawasan Lingkungan) 2. SOP tentang Pembuatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Lingkungan Hidup 3. SOP tentang Koordinasi Gerakan Simpatika Bersih (GSB) 4. SOP tentang Penyusunan Laporan Periodik Volume Sampah 5. SOP tentang Pembuatan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup (LSLHD) 6. SOP tentang Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 7. SOP tentang Kegiatan Penilaian Adipura 8. SOP tentang Kegiatan Penilaian Kalpataru 9. SOP tentang Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup 10. SOP tentang Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup 11. SOP tentang Pembuatan Implementasi Dokumen AVIDAL dan UKL-UPL 12. SOP tentang Pembuatan UKL-UPL 13. SOP tentang Pembuatan Dokumen AVIDAL 14. SOP tentang Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pengelolaan Sampah 15. SOP tentang Pemantauan Kualitas Media Lingkungan 16. SOP tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Ada 24 SOP

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPND terkait.

Lampiran
III-2

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) Kabupaten Pesir Selatan Tahun 2019

						17. SOP tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 18. SOP tentang Penyusunan LKJ 19. SOP tentang Pengurusan Surat Keluar 20. SOP tentang Pengurusan Surat Masuk 21. SOP tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 22. SOP tentang Pengisian DP3 23. SOP tentang Pengurusan Kemakan Pangkat Pegawai 24. SOP tentang Pengurusan Kemakan Gaji Berkala	
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan PERANGKAT DAERAH menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100 %	- PERDA pelaksanaan sebanyak 0 - PERDA yang seluasnya, sebanyak 1	0	
3	PENATAAN KELEMBAGAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- jabatan yang ada sebanyak 12 - jabatan yang harus ada, sebanyak 12	100 %	
		5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi PERANGKAT DAERAH		Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi PERANGKAT DAERAH	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional.	Tidak Ada	
		6 Rasio PNS kabupaten		Jumlah PNS PERANGKAT DAERAH terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS PERANGKAT DAERAH, sebanyak 22 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.827 personil	0,29 %	
4	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas PERANGKAT DAERAH yang relevan dengan urusan terkait	7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat PERANGKAT DAERAH yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 7 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 12 org.	58,3 %	
	PENCELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian		Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawaian dibagi jumlah total pejabat PERANGKAT DAERAH yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepegawaian, sebanyak 12 org. - jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt	100 %	

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh PERANGKAT DAERAH	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di PERANGKAT DAERAH -RENSTRA PERANGKAT DAERAH -RENJA PERANGKAT DAERAH -RKA-PERANGKAT DAERAH	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan PERANGKAT DAERAH berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Ada 4 jenis dokumen
	Sinkronisasi Program RENJA PERANGKAT DAERAH dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam RENJA PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja PERANGKAT DAERAH, sebanyak 8 program. - Program Renja PERANGKAT DAERAH yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 8 Program	100 %
	Sinkronisasi program RKA PERANGKAT DAERAH dengan Program RENJA PERANGKAT DAERAH	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam RKA PERANGKAT DAERAH x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 8 program. - Program dalam RKA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 8 program.	100 %
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH dibagi jumlah program dalam DPA PERANGKAT DAERAH x 100 %	- Program RENJA PERANGKAT DAERAH yang diakomodir dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 8 program. - Program dalam DPA PERANGKAT DAERAH, sebanyak 8 program.	100 %
	Alokasi anggaran	13	Anggaran PERANGKAT DAERAH terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran PERANGKAT DAERAH dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 5.245.262.263,- - Total belanja APBD, sebesar Rp. 1.860.991.871.831,39,-	0,28 %
PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total PERANGKAT DAERAH	Belanja modal dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%	- Belanja Modal PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 435.776.200,- - Total belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 5.245.262.263,-	8,30 %
	Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH x 100%	- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 5.050.000,- - Total belanja barang dan jasa PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 1.736.559.841,-	0,29 %

6	Laporan keuangan PERANGKAT DAERAH	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja PERANGKAT DAERAH	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja PERANGKAT DAERAH x 100%	- Total belanja pemeliharaan PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 5.050.000,- - Total Belanja PERANGKAT DAERAH, sebesar Rp. 5.245.262.263,-	0,09%
		17	Keberadaan laporan keuangan PERANGKAT DAERAH (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan PERANGKAT DAERAH berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb, 1. Neraca 2. Calk 3. LRA	Ada
7	PENGCELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	18	Keberadaan inventarisasi barang atau aset PERANGKAT DAERAH	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset PERANGKAT DAERAH	Ada, Dokumen Asset Dinas Lingkungan Hidup - KIB A, B, C, D, E, dan F - KIR	Ada
		19	Jumlah yang tidak digunakan oleh PERANGKAT DAERAH	Jumlah asset yang tidak digunakan PERANGKAT DAERAH dibagi total asset yang dikuasai PERANGKAT DAERAH x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 136 asset. - Asset yang dikuasai PERANGKAT DAERAH, sebanyak 1012 asset.	13,43%
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	20	Bentuk-bentuk fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Ada, - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet - Website	Jumlah sebanyak 4 jenis
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak Ada

KEPALA DINAS LINGKUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. Jurnu Triano, Sp.M.Si
NIP. 19691121 198512 1 001